

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, salah satu agenda dari reformasi keuangan negara adalah adanya perubahan dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja. Salah satu cara alternatif adalah dengan mewirauasakan pemerintah (*entrepreneurship the government*) guna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal tersebut, Pemerintah akhirnya membentuk suatu Badan Layanan Umum. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 68 dan 69, Badan Layanan Umum atau yang sering disebut BLU diartikan sebagai suatu instansi di lingkungan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. BLU diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam kemajuan manajemen keuangan sektor publik demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. BLU pada pemerintah daerah disebut sebagai BLUD.

BLUD diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk mencapai tujuan dari BLUD. Pola pengelolaan tersebut disebut dengan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD. Praktik bisnis yang sehat adalah dalam penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka memberikan layanan yang bermutu dan berkesinambungan (Pasal 1 PP 23/2005). BLUD merupakan bagian dari Kementerian atau Lembaga/Pemda sehingga status hukumnya tidak terpisah dari instansi induk. Pendapatan BLUD dikonsolidasikan dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian atau Lembaga/Pemda yang bersangkutan. Oleh karena itu, BLUD mempunyai kewajiban dalam menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Institusi yang dapat melakukan PPK BLUD adalah instansi yang langsung memberikan layanan kepada masyarakat. Salah satu contohnya adalah RSUD Kabupaten Kediri. RSUD Kabupaten Kediri adalah salah satu BLUD yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten Kediri. Pendapatan BLUD tidak hanya berasal dari layanan yang diberikan (seperti poli gigi, poli umum, rawat inap, dan lain-lain) tetapi juga berasal dari APBD, pendapatan hibah, dan sumbangan dari masyarakat atau badan.

Berbeda dengan RSUD pada umumnya, RSUD Kabupaten Kediri merupakan satu-satunya rumah sakit di Kabupaten Kediri yang ditunjuk menjadi

rumah sakit rujukan *Covid 19* sesuai dengan penetapan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/125/KPTS/013/2020. Hal tersebut menjadikan RSUD Kabupaten Kediri mengalami banyak perubahan terutama dalam hal penerimaan pendapatan saat terjadinya *Covid 19* atau lebih tepatnya saat tahun 2020 dan 2021. Perubahan tersebut berupa perubahan struktur pendapatan seperti adanya dana bagi hasil yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang sebelumnya tidak pernah diterima oleh RSUD Kabupaten Kediri.

Pandemi *Covid 19* yang terjadi di Indonesia sangat mempengaruhi aspek kesehatan, sehingga hal tersebut menjadi fokus utama pemerintah. Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran *Covid 19* sebagai bencana nasional menjadikan aspek kesehatan menjadi garda terdepan.

Berdasarkan latar belakang yang telah di sampaikan di atas, Penulis akan membandingkan penerapan kebijakan akuntansi pendapatan RSUD Kabupaten Kediri dengan peraturan yang ada, serta membandingkan pendapatan saat pandemi dengan sebelum pandemi *Covid 19*. Oleh karena itu, dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini, Penulis menyusun KTTA dengan judul “Tinjauan Pengelolaan Pendapatan RSUD Kabupaten Kediri sebagai Badan Layanan Umum Daerah pada Masa Pandemi *Covid 19*”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, Penulis membuat rumusan masalah seperti di bawah ini:

- 1) Apakah terdapat perbedaan pendapatan sebelum pandemi dan saat pandemi *Covid 19*?
- 2) Bagaimana praktik akuntansi pendapatan pada RSUD Kabupaten Kediri?
- 3) Bagaimana pihak manajemen RSUD Kabupaten Kediri merespon perbedaan pendapatan yang terjadi sebelum pandemi dan saat pandemi *Covid 19*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai terkait dengan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- 1) mengetahui perbedaan pendapatan sebelum pandemi dan saat pandemi *Covid 19*;
- 2) mengetahui praktik akuntansi pendapatan pada RSUD Kabupaten Kediri;
- 3) mengetahui respon pihak manajemen RSUD Kabupaten Kediri terkait perbedaan pendapatan yang terjadi sebelum pandemi dan saat pandemi *Covid 19*.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup dari karya tulis tugas akhir ini adalah akuntansi pendapatan pada RSUD Kabupaten Kediri sebagai Badan Layanan Umum Daerah untuk periode tahun 2019, 2020, dan 2021 serta pengaruh dari pandemi *Covid 19* terhadap pendapatan RSUD Kabupaten Kediri.

Penulis membatasi ruang lingkup pada periode 2019, 2020, dan 2021 untuk mendapatkan pemahaman terhadap tinjauan akuntansi atas pendapatan RSUD Kabupaten Kediri berdasarkan data yang terbaru dan paling aktual dan berdasarkan PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan karya tulis tugas akhir ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat baik manfaat teoritis maupun praktis.

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penerapan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah dan dapat digunakan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di perkuliahan.

2) Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dalam mengimplementasikan akuntansi pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah pada instansi terkait.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan menambah wawasan bagi yang ingin melakukan atau melanjutkan penelitian mengenai akuntansi pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah.

3) Bagi RSUD Kabupaten Kediri

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi petunjuk dan pertimbangan bagi RSUD Kabupaten Kediri untuk penyusunan laporan keuangan periode selanjutnya agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu evaluasi bagi pemerintah untuk menilai kebijakan akuntansi pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan kebijakan standar akuntansi yang berlaku dan untuk meninjau kebijakan yang ada terhadap perubahan yang mungkin terjadi terkait dengan pandemi *Covid 19*.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, hasil penelitian sebelumnya, serta dilengkapi dengan kerangka pemikiran. Teori-teori tersebut dapat berasal dari buku, PMK, Undang-Undang, Keppres, PSAP, dan lain-lain.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan tentang apa yang harus dilakukan agar dapat menjawab rumusan masalah. Metode penelitian yang akan digunakan bergantung pada pendekatan dan penyusunan KTTA. Pada umumnya bagian ini menjelaskan jenis dan sumber data, prosedur analisis, dan pengolahan data dari RSUD Kabupaten Kediri.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan menjawab rumusan masalah secara singkat.